

**ANALISIS PELAKSANAAN
FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2011-2013**

By: Izwan

Izwanalie@yahoo.com

Supervisor: **Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

This study aimed to determine and analyze the performance of the functions of Border Management Agency District Meranti Islands to the problems that occurred in the border area for example, concerning the environment, especially coastal erosion, infrastructure development, security and defense in 2011-2013. This study focused on Border Management Agency District Meranti Islands. With the formulation of research problems, namely how the implementation of the functions of the Regional Border Management Agency in Meranti Islands District Year 2011-2013 and inhibiting factors in the implementation of the functions of the Regional Border Management Agency in Meranti Islands District Year 2011-2013.

This research is descriptive in which researchers provide a description and picture of the phenomenon or social phenomena studied by describing the independent variables systematically and accurately. The method of data collection is done by in-depth interview, participant observation, and documentation.

These results indicate that the function of Border Management Agency District Meranti Islands in the exercise of its functions to the border area is not in line with the objectives and targets set. It does not fit with the vision and mission of the Border Management District Meranti Islands. Resulting in maximal performance of the functions of Border Management Agency District Meranti Islands to the border area.

Keywords: implementation, functions, Border Management Agency

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional Bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunan sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan itu, maka wilayah kedaulatan adalah wilayah geografis dan wilayah sosial, ekonomi dan budaya yang merupakan satu kesatuan. Kemajemukan atau pluralitas bangsa kita harus dipandang sebagai modal dasar bukan sebagai perbedaan, karena common denominator kita adalah cita-cita kita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia Setiawan Djody, (2009:159).

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir Timur Sumatra. Mempunyai wilayah yang strategis di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yang merupakan perbatasan laut (Selat Malaka). Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti 6.822.82 km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 12 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada dikawasan perbatasan tersebut memberi implikasi terhadap munculnya sejumlah permasalahan dan isu strategis yang menuntut penanganan dan

pengelolaan yang lebih serius dan komprehensif serta melibatkan banyak pihak terkait.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 26 Tahun 2011 tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti, didalam bab III tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi dibagian pertama yaitu tugas pokok pasal 3 ayat 1 Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rancana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi pengawasan di Kepulauan Meranti. pasal 3 ayat 2 dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai mana yang dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a) melaksanakan kebijakan pemerintahan dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan
- b) menjaga dan memelihara tanda batas
- c) melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan diwilayahnya, dan
- d) melakukan pembangunan dikawasan perbatasan diantara pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga

Adapun pada bagian kedua fungsi pasal 4 Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan dan penempatan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti
- b) pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelola serta pemanfaatan batas wilayah negara

- dan kawasan perbatasan di Kepulauan Meranti
- c) pengelola dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Kabupaten Kepulauan Meranti
 - d) inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti
 - e) penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya dikawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti
 - f) penyusunan anggaran pembangunan dan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Kabupaten Kepulauan Meranti
 - g) pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sesuai dengan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdapat di dalam Peraturan Daerah No 26 Tahun 2011 harus berjalan sesuai harapan masyarakat. Pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu mendesak untuk dilakukan, hal ini menyangkut dengan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan tiga isu aktual kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

1. Menyangkut lingkungan hidup khususnya abrasi pantai.
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Pertahanan dan keamanan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Bab V Kewenangan Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan
 - b. Menjaga dan memelihara tanda batas
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan dikawasan perbatasan diwilayahnya
 - d. Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.

Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai pengawasan dan tujuan dibentuk lembaga tersebut merespon keinginan pusat dan menindak lanjuti dalam memberdayakan pulau terluar, Diharapkan kawasan perbatasan akan tumbuh lebih cepat, sehingga paradigma kawasan perbatasan sebagai “halaman belakang” dapat diubah sebagai “halaman depan rumah” yang asri dan sejuk. Di Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendirinya ada enam Kecamatan yang menjadi perhatian Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melakukan fungsinya antara lain :

1. Kecamatan Ransang
2. Kecamatan Ransang Pesisir
3. Kecamatan Ransang Barat
4. Kecamatan Merbau
5. Kecamatan Pulau Merbau
6. Kecamatan Tasik Putri Puyu

Sesuai tiga isu aktual kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah harus bisa melakukan terobosan atau perencanaan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karna sesuai kondisi di lapangan permasalahan tersebut bila tidak segera di tindak lanjuti maka permasalahan tersebut akan berkelanjutan. Karna Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu dari 38 kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara, yang terus berupaya untuk menjaga wilayah teritorial Indonesia. Upaya pengamanan itu perlu didukung dana sharing dan program konkrit guna menyelamatkan pulau-pulau terluar Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah atau tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto Bagong, 2010:5).

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Alasan melakukan penelitian di Badan Pengelola Perbatasan Daerah dikarenakan sebagian Kabupaten ini berbatasan dengan daerah tetangga. Sehingga melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah sesuai dengan fungsi yang ada apakah pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan tugas serta fungsi yang telah ditetapkan.

Informan dalam penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses fungsi Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dampak serta situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. *Indepth interview*, wawancara yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang melakukan wawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada pihak Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan orang-orang yang terkait dalam penelitian ini.
- b. Observasi partisipatif, observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah situasi dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Observasi yaitu sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menapsirkannya, mengungkapkan paktor penyebabnya, dan menemukan kaedah-kaedah yang mengaturnya (Emzir, 2012:36).
- c. Dokumentasi, teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti (Widodo, 2012:61). Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karna banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menapsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Teknis analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan. Analisis data, menurut Putton dalam Meleong (2007:280) adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikan kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian ini menggunakan kualitatif, data yang terkumpul dikelompokkan menurut kebutuhan. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data
Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.
2. *Display* (penyajian) data
Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksana daerah dibidang perbatasan yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas Desentralisasi dan pembantuan dibidang perbatasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam organisasi, gagasan konsep organisasi ialah koordinasi usaha untuk saling membantu, namun agar koordinasi itu bermanfaat harus ada tujuan yang hendak dicapai, dan kata sepakat mengenai tujuan itu. Pelaksanaan fungsi ialah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini beberapa pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan fungsinya terhadap daerah perbatasan diantaranya :

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksana daerah dibidang perbatasan yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas Desentralisasi dan pembantuan dibidang perbatasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendirinya ada enam Kecamatan yang menjadi perhatian Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melakukan fungsinya antara lain :

1. Kecamatan Ransang
2. Kecamatan Ransang Pesisir
3. Kecamatan Ransang Barat
4. Kecamatan Merbau
5. Kecamatan Pulau Merbau
6. Kecamatan Tasik Putri Puyu

Sesuai kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah harus bisa melakukan terobosan atau perencanaan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karna

sesuai kondisi di lapangan permasalahan tersebut bila tidak segera di tindak lanjuti maka permasalahan tersebut akan berkelanjutan. Karna Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu dari 38 kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara, yang terus berupaya untuk menjaga wilayah teritorial Indonesia. Upaya pengamanan itu perlu didukung dana sharing dan program konkrit guna menyelamatkan pulau-pulau terluar Indonesia.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Visi yaitu, Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti yang Maju Niaganya dan Unggul dalam Masyarakat yang Madani ditunjang oleh Infrastruktur yang Mapan dan situasi Hankam yang Kondusif.

Adapun Misi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan perencanaan wilayah perbatasan
2. Meningkatkan perekonomian wilayah perbatasan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan
4. Meningkatkan pembinaan mental spiritual, sosial, dan budaya masyarakat menuju masyarakat yang berakhlakul karimah dan waspada terhadap ancaman pertahanan/keamanan nasional.
2. **Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan diwilayahnya**

Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai pengawasan dan tujuan dibentuk lembaga tersebut merespon keinginan pusat dan menindak lanjuti dalam memberdayakan pulau terluar, Diharapkan kawasan perbatasan akan tumbuh lebih cepat, sehingga paradigma kawasan perbatasan sebagai “halaman belakang” dapat diubah sebagai “halaman depan

rumah” yang asri dan sejuk. Tiga isu aktual kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

1. Menyangkut lingkungan hidup khususnya abrasi pantai
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Tingkat keamanan dan pertahanan

Urusan dalam pengelolaan daerah perbatasan, fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan beberapa bidang organisasi Badan Pengelola Perbatasan. Selain melibatkan pengurus juga melibatkan semua yang terkait dalam pengelolaan daerah perbatasan, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Perusahaann dan Masyarakat. Sementara itu dalam rangka pelaksanaan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan instansi terkait. Setiap organisasi tersebut memiliki peran untuk mewujudkan tujuan dari fungsi yang ada dan bertanggung jawab terhadap wewenang yang telah dibentuk. Hal ini tidak lain adalah sebagai langkah awal dalam peningkatan kawasan yang maju didaerah perbatasan. Baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan yang menjadi prioritas suatu tempat. Dalam menjalankan fungsinya bisa kita lihat Badan Pengelola Perbatasan Daerah sudah melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan terhadap instansi yang terkait. Hanya menunggu atau membentuk sinergitas yang kuat dan sama dalam melakukan pembangunan dikawasan perbatasan.

3. **Penyusunan dan penempatan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kepulauan Meranti**

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang berkerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Badan Pengelola Perbatasan

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan penyusunan dan penempatan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kepulauan Meranti harus ada kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu sehingga hasilnya efektif dan efisien. Diantara isu strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Master Plan pengembangan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan dan pembakuan titik dasar/garis pangkal wilayah perbatasan laut.
2. Pembangunan dan peningkatan fasilitas dan fungsi Pos pengawasan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta aksesibilitas kawasan perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan.
4. Potensi konflik serta gangguan keamanan dan ketertiban.
5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Potensi degradasi kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali serta bencana abrasi pesisir pantai terjangan air pasang laut.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut.
8. Optimalisasi posisi strategis kawasan perbatasan yang keterbelakang menjadi serambi terdepan Negara, Provinsi Riau umumnya dan Kabupaten Kepulauan Meranti Khususnya.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa setiap perencanaan dalam fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki standar atau tujuan yang jelas yang ingin dicapai sesuai visi dan misi Badan Pengelola Perbatasan itu sendirinya. Sehingga bisa mencapai pembangunan berwawasan di

daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. **Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya dikawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti**

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan fungsinya, Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya dikawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti maka ada program unggulan kawasan perbatasan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Program unggulan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah :

1. Penahanan abrasi, tanggul, pintu air penahan banjir pasang, dan pelabuhan lintas batas.
2. Infrastruktur jalan dan drainase (diselaraskan dengan kolam retensi).
3. Elektrifikasi.
4. Air bersih: pembangunan kolam retensi (sekalius penangkal banjir).
5. Meningkatkan SDM pengelola/birokrasi dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan (pembentukan UPT di Kecamatan Kawasan Perbatasan).
6. Kesehatan dan pendidikan.
7. Keterampilan pertanian dan perikanan.
8. Pembinaan mental akhlaq, dan budaya masyarakat untuk Hankam.
9. Mempersiapkan masyarakat untuk waspada terhadap gangguan pertahanan dan keamanan (Garda Perbatasan).
10. Melengkapi fasilitas keamanan laut (Pos Keamanan Laut dan kapal patroli).

Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya dikawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti ini harus melihat potensi lingkungan yang ada didaerah perbatasan. Sehingga tidak bertentangan dengan lingkungan apa lagi masyarakat daerah perbatasan tersebut. Karena harus ada sosialisasi program dalam kebijakan yang telah ditentukan agar tujuan dan sasaran bisa berjalan efektif dan efisien.

5. **Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai skala prioritas di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Setiap lembaga memiliki peran untuk mewujudkan tujuan dari fungsi yang ada dan bertanggung jawab terhadap wewenang yang telah dibentuk. Hal ini tidak lain adalah sebagai langkah awal dalam peningkatan kawasan yang maju didaerah perbatasan. Baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan yang menjadi prioritas suatu tempat. Dalam Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai skala prioritas di Kabupaten Kepulauan Meranti ini harus melihat kondisi daerah perbatasan. Karna penyusunan anggaran ini menyangkut pembangunan di daerah perbatasan itu sendirinya. Berikut ini adalah tabel perencanaan pembiayaan dalam pembangunan kawasan perbatasan yang dilakukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rekapitulasi Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti 2013-2032

Misi	Biaya 2013-2032	Biaya rata-rata per tahun
Infrastruktur dan Prencanaan	6,128 Trilyun	306,4 Milyar
Ekonomi	510 Milyar	25, 5 Milyar
Sumber daya manusia	552 Milyar	27, 6 Milyar
Sosial Budaya,	150 Milyar	7,5

Kemasyarakatan, hankam		Milyar
Total	7,340 Trilyun	367 milyar

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Kep. Meranti

Dengan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai skala prioritas di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mempercepat pembangunan didaerah perbatasan. Tetapi itu semua tergantung terhadap daerah itu sendirinya dalam percepatan pembangunan didaerah perbatasan. Karna di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pembangunan bukan dilakukan didaerah perbatasan saja, tetapi dilakukan diseluruh Kabupaten. Maka dengan ini membutuhkan biaya yang besar. Sudah tentu harus melirik ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

B. Perencanaan, Pengorganisasian, Pekerjaan dan Pengawasan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Melaksanakan Fungsinya

Stoner dan Wankel (2011:82) berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola dan melestarikan daerah perbatasan, memerlukan setidaknya ada empat hal yang merupakan prinsip pokok dalam manajemen. Yakni perencanaan, pengorganisasian, pekerjaan, dan pengawasan. Prinsip-prinsip pokok itu harus dilakukan dengan melibatkan organ-organ dalam organisasi.

1. Perencanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan fungsinya

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan bersifat mutlak bagi pelaksanaan manajemen yang baik. Perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Pada tahap perencanaan yang nyata ini keterlibatan para instansi terkait tidak bisa dilepaskan, karena setiap instansi mempunyai perannya masing-masing. Ini akhirnya melahirkan strategi yang dikelompokkan menjadi Analisis SWOT. Yaitu strategi S-O (menggunakan kekuatan untuk memperoleh peluang), strategi S-T (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman), strategi W-O (menutup kelemahan untuk meraih peluang), dan strategi W-T (menutup kelemahan untuk menghadapi ancaman). Paduan dari strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT inilah yang menjadi strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bedasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa setiap perencanaan dalam fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki standar atau tujuan yang jelas yang ingin dicapai sesuai visi dan misi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendirinya. Sehingga bisa mencapai pembangunan berwawasan di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Organisasi dalam pengelolaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama (Syamsir torang 2013:25). Organisasi merupakan alat, dan wadah tempat seorang pemimpin melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa apabila organisasi baik, maka tujuan dari organisasi tersebut akan baik dan relatif

mudah untuk dicapai. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan mencakup dua aspek pembangunan, yaitu aspek kesejahteraan (*prosperity*) dan aspek keamanan (*security*), yang dirinci dalam tiga kebijakan berdasarkan Master Plan pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan mendukung upaya memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan mendukung upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah yang ada melalui peningkatan infrastruktur, dan peningkatan sumber daya manusia.
3. Kebijakan mendukung pemantapan keamanan dalam rangka pembinaan serta peningkatan ketahanan wilayah menuju terciptanya ketahanan nasional.

Terdapat tujuh fokus kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dalam Rancangan RPJMN 2010-2014, diantaranya:

1. Penyelesaian penetapan dan penegasan batas negara.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan.
3. Peningkatan kemampuan kerjasama kegiatan ekonomi antara kawasan perbatasan dengan negara tetangga.
4. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.
5. Pemeliharaan kelestarian lingkungan.
6. Peningkatan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keberpihakan pendanaan pembangunan.

Dalam hal keorganisasian untuk menjalankan fungsinya Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan pembangunan berwawasan di daerah perbatasan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah perbatasan.

3. Implementasi Pekerjaan yang dilakukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan fungsinya

Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian, maka kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu dengan implementasi seluruh perencanaan dan diorganisasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada pengimplementasian perencanaan yang telah ada oleh kelompok organisasi. Berbicara mengenai implementasi, tidak lepas dari pengaruh dari kebijakan yang telah ada. Implementasi adalah suatu tindakan/pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Karena tercapainya tujuan bukan hanya tergantung pada perencanaan, dan pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada implementasi dari perencanaan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan dalam menjalankan fungsinya masing-masing pegawai sekretaris sangat berperan serta menerima petunjuk dan arahan dari kepala untuk memberi dan mengerjakan tugas dan membimbing para pegawai agar pelaksanaan fungsinya berjalan dengan lancar dan tertib. Dalam melaksanakan implementasi pekerjaan, Badan Pengelola Perbatasan harus ada koordinasi atau komunikasi baik terhadap instansi yang terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Sehingga bisa tercapai sasaran atau tujuan bersama.

Dengan implementasi pekerjaan perencanaan yang dilakukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan fungsinya, maka harus ada sinergitas antara

Kepala Badan, Sekretaris dan Bidang-bidang yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga apa yang di prioritaskan bisa tercapai dalam pembangunan yang berkelanjutan di kawasan perbatasan.

4. Pengawasan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kontrol adalah kunci dalam manajemen. Walaupun pendelegasian adalah hal yang mutlak dalam organisasi, tetapi pendelegasian bukan berarti menyerahkan segala urusan tanpa kendali. Begitu pun orang-orang dalam organisasi, seburuk-buruknya sistem manajemen jika ada kontrol dan umpan balik yang rutin dilakukan maka hasilnya masih dapat diterima. Menurut Siagian (1991:176) pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana *controlling* dilaksanakan oleh organisasi. Hal tersebut diperkuat oleh Murdick dan Ross (1983:176) yang mengemukakan bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya ruang organisasi. Pelaksanaan pengawasan secara internal terhadap pelaksanaan fungsi, dalam konteks ini pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Sementara pelaksanaan pengawasan penganggaran secara eksternal terhadap tugas dan fungsi dalam konteks ini pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh :

1. BPK
2. Inspektorat

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa BPK dan Inspektorat sebagai institusi yang mengawasi dan melakukan audit terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Perbatasan

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap tugas dan fungsi yang telah ada. Pengawasan eksternal terhadap tugas dan fungsi juga dilakukan oleh anggota DPRD, karena pengawasan merupakan fungsi lembaga perwakilan yang ada di daerah yaitu legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, penganggaran dan fungsi pengawasan. Dari hasil penelitian penulis maka didapatkan bahwa DPRD melakukan cek kelapangan untuk mendengar dan melihat fakta dan informasi dilapangan kemudian merumuskan menjadi alternatif-alternatif kebijakan serta meminta hasil laporan kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.

C. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara keseluruhan dalam pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti masih terdapat berbagai kendala-kendala atau hambatan yang ditemukan dilapangan. Walau terdapat sejumlah persoalan yang mengganggu atau menghambat pelaksanaan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berkeinginan menuntaskan permasalahan yang terjadi pada lembaga tersebut. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan

Tersedianya sarana dan prasarana (Peralatan) dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional secara rutinitas, merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Karyawan, ketersediaan peralatan/sarana dan prasarana ini sangat diperlukan dan akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsinya Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika dilihat kondisi peralatan yang ada dibandingkan dengan beban kerja yang akan dicapai sangat jauh berbeda terutama dalam mendukung kelancaran tugas-tugas teknis, misalnya komputer yang ada beserta perlengkapannya sangat menghambat kelancaran tugas, hal ini disebabkan kapasitas komputer yang sangat rendah dan secara kuantitas sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan.

Disamping itu, untuk kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menumpang diroko dengan alasan belum mempunyai gedung sendiri. Sehingga bisa dikatakan sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya. Tetapi itu semua bukan menjadi alasan dalam pelaksanaan fungsi lembaga tersebut terhadap daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Ketentuan regulasi dalam pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksana daerah dibidang perbatasan yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas Desentralisasi dan pembantuan dibidang perbatasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai pengawasan dan tujuan dibentuk lembaga tersebut merespon keinginan pusat dan menindak lanjuti dalam memberdayakan pulau terluar.

Sehingga dalam pelaksanaan fungsinya terhadap daerah perbatasan yang memiliki masalah yang serius misalnya abrasi pantai, infrastruktur serta tingkat keamanan di daerah perbatasan menjadi terkendala karna Badan Pengelola Perbatasan bukan sebagai pelaksana atau eksekutor melainkan sebagai pengawasan

didaerah perbatasan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan fungsinya menyangkut permasalahan yang terjadi didaerah perbatasan harus ada koordinasi atau kerja sama antara lembaga atau dinas yang terkait sehingga permasalahan yang terjadi didaerah perbatasan bisa terlaksana sesuai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

3. Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah

Sumber dana (Keuangan) pada setiap organisasi atau Badan merupakan urat nadi bagi suatu Badan untuk menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Lancarnya aktifitas/kegiatan suatu Badan yang dijalankan oleh setiap personil sangat ditunjangkan oleh sumber dana yang tersedia. Dana yang tersedia juga merupakan salah satu alat untuk meningkatkan dan motivasi personil dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, misalnya dalam rangka memberikan kesejahteraan personil. Dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi. Dalam hal pendanaan pelaksanaan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di biayai oleh APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Akan tetapi Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki anggaran dana terbatas untuk pelaksanaan kegiatan didaerah perbatasan. Sehingga terbatasnya anggaran dana tersebut juga mempengaruhi optimalnya penyelesaian masalah didaerah perbatasan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa setiap bidang diberikan kewenangan masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan dikawasan perbatasan yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan berwawasan didaerah perbatasan. Namun perencanaan belum sesuai dengan yang diinginkan dan masih banyak kendala dalam hal keorganisasian

untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan didaerah perbatasan yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan berwawasan didaerah perbatasan.

Dalam tahap pekerjaan menjalankan fungsi masing-masing pegawai, Sekretaris sangat berperan dan menerima petunjuk serta arahan dari Kepala untuk memberi perintah, membagi tugas dan arahan kepada pegawai agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan baik. Sedangkan pada tahap pengawasan, yaitu :

- a. Internal
Pengawasan terhadap tugas dan fungsi bidang yang mengelola pelaksanaan didaerah perbatasan dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Eksternal
Dalam pengawasan terhadap tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan oleh 2 (dua) instansi yaitu, BPK dan Inspektorat. Selain itu pengawasan eksternal dilakukan oleh anggota DPRD, karna pengawasan merupakan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu legislatif atau pembuat peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan fungsi pengawasan.

Dari hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan.
2. Ketentuan regulasi dalam pelaksanaan fungsi Badan Pengelola

- Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Amirullah dan Budiyo. 2004. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta : BPFE
- Bagong, Sayanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung : Alfabeta
- Djody, Setiawan. 2009. *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, Jakarta : Elexmedia Komputindo
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- E. Kast, Fremont dan James F. Rosenzweig. 1995. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Bumi Asara
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : Rajawali Pers
- Koho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta : Polgov
- Katili, Laura R. 1998. *Pengendalian Dan Pengawasan Dalam Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moekijat. 1986. *Pengembangan Organisasi*, Bandung : CV Remadja Karya
- Moleong, J, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Manullang, M. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito
- Nugroho, Riant & Randy R, Wrihatnolo. 2006. *Manajemen Provitisasi BUMN*, Jakarta : Gramedia
- S.P. Hasibuan, H. Malayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta : Bumi Aksara
- Siagan, S.P. 1991. *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Politik*, Jakarta : CV Haji Mas Agung
- Syafiee, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintah*, Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Silalahi, Uber. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE UGM
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisai dan Manajemen*, Bandung : CV Alfabeta
- Tjokromidjojo, Bintaro. 1977. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Presindo
- Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, Jakarta : Magna Script Publishing

Dokumentasi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
2. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 26 Tahun 2011 tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok

organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 56 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Penyusunan rencana induk (MASTER PLAN) pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Skripsi :

Andy Ansyari. 2014. *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Terhadap*

Daerah Aliran Sungai Tahun 2013, Program Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru.

Akbar Hidayat. 2014. *Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Pelalawan (studi kasus Kecamatan Langgam tahun 2012-2013)*, Program Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru.

Reski Lestari. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Siak : Studi Kasus Daerah Hilir Daerah Aliran Sungai Siak Tahun 2010-2013*, Program Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru.